

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan pembahasan mengenai koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja melalui satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan SK Wali Kota tahun No. 420.45-803 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor masa bakti 2020-2024. Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terdapat enam variabel yaitu:

1. Tujuan dan standar dalam kebijakan Sk Wali Kota tentang Satuan Tugas (satgas) pelajar kota. Bogor ialah agar lingkungan kota. Bogor kondusif aman bagi pelajar. Keberhasilan satgas pelajar kota. Bogor didukung dengan tujuan dan SOP kerja yang sama dengan para *stakeholder*.
2. Sumber daya kebijakan dalam satgas pelajar kota. Bogor sumber daya manusia berasal dari guru-guru yang didelegasikan oleh kepala sekolah se-kota. Bogor dan bekerja sama dengan organisasi/lembaga yang bersinggungan erat dengan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar. Sedangkan sumber daya anggaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ini belum adanya anggaran tetap dari pemerintahan dan masih mengandalkan sumbangan sekolah-sekolah dan anggota.

3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi ditemukan bahwa satgas pelajar kota. Bogor bekerja sama mulai dari Dinas Pendidikan, Kepolisian baik kapolsek dan polresta, KCD wilayah II, Kecamatan, dan organisasi masyarakat seperti GAPENTA, PPM, BAKOMA, FKPPi sehingga dapat mencapai tujuan.
4. Karakteristik dari agen pelaksana dalam satgas pelajar kota. Bogor memiliki atribut pengenalan/identitas organisasi dan pelaksana implementasi kebijakan memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian yang baik dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar.
5. Kecenderungan dari pelaksana anggota satgas pelajar memahami tujuan kebijakan sehingga dapat menuai berbagai keberhasilan dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar. Keenam, kondisi ekonomi, sosial, dan politik memberikan dukungan pada pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor.
6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik di kota. Bogor cukup mendukung pelaksanaan pencegahan penyimpangan perilaku pada remaja terlebih pada kondisi sosial banyak masyarakat.

Dalam pelaksanaan implementasi koordinasi satgas pelajar kota. Bogor terdapat proses koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Koordinasi dalam organisasi sangat penting karena dapat mendorong organisasi dalam mencapai tujuan. Pada pelaksanaan koordinasi satgas pelajar kota. Bogor memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. kontak langsung di mana pada prinsip ini koordinasi dilakukan secara langsung.
2. Mulai sejak awal dalam satgas pelajar kota. Bogor prinsip ini terlaksana karena sejak awal sudah dilakukan diskusi bersama terkait kegiatan-kegiatan satgas pelajar kota. Bogor.

3. Relasi timbal balik dalam satgas pelajar kota. Bogor organisasi/lembaga yang bekerja sama berkaitan erat saling membantu dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar.

Keberhasilan koordinasi dapat diukur melalui indikator-indikator koordinasi. Dalam pelaksanaan koordinasi terdapat indikator-indikator koordinasi yang memengaruhi keberhasilan koordinasi, dalam satgas pelajar kota. Bogor dapat disimpulkan bahwa satgas pelajar kota bogor memenuhi indikator-indikator tersebut.

1. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari proses koordinasi. Satgas pelajar kota. Bogor memiliki alur informasi dua arah yaitu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Komunikasi dalam satgas pelajar didukung dengan alat dan media komunikasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi dalam hal ini anggota satgas pelajar kota. Bogor sudah memiliki kesadaran pentingnya koordinasi dalam organisasi.
3. Kompetensi partisipan yang terjadi dalam satgas pelajar kota. Bogor karena adanya pantaun dari dinas pendidikan dan organisasi/lembaga yang tergabung menjalankan perannya masing-masing sesuai bidang ahlinya. Adanya kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam pelaksanaan satgas pelajar kota. Bogor yang telah diatur dalam SOP satgas pelajar kota. Bogor.
4. Kontinuitas satgas pelajar kota. Bogor sudah mengalami beberapa kali pergantian regulasi kesempatan bersama terakhir dibuat pada tahun 2020 belum ada perubahan lagi untuk saat ini.

Komunikasi tidak dapat di pisahkan dari proses koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor komunikasi dilakukan melalui berbagai metode

hal ini dilakukan untuk mempermudah penyampaian pesan dalam organisasi. Metode komunikasi yang digunakan yaitu:

1. komunikasi tertulis berupa surat.
2. Komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung biasanya melalui pertemuan/rapat.
3. Komunikasi nonverbal yang dilakukan pada situasi atau kondisi tertentu.
4. Komunikasi melalui media elektronik satgas pelajar kota. Bogor memanfaatkan media *whatsapp* dalam melakukan komunikasi dan koordinasi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan satgas pelajar kota. Bogor hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat satgas pelajar kota. Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut yaitu:

1. Faktor pendukung koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar melalui satgas pelajar kota. Bogor ialah a). adanya kesatuan tindakan antar organisasi/lembaga yang terlibat, b). adanya komunikasi dalam setiap proses koordinasi satgas pelajar kota. Bogor, c). adanya pembagian kerja dalam organisasi satgas pelajar kota. Bogor, d). anggota satgas pelajar kota. Bogor yang disiplin dalam sikap dan tingkah laku sehingga menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Faktor penghambat koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar melalui satgas pelajar kota. Bogor ialah a). tidak semua sekolah se-kota bogor ikut berperan aktif melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar, b). tidak adanya anggaran tetap

untuk operasional, c). kurangnya sumber daya manusia dalam tim satgas eksternal.

## 6.2. Saran.

Berdasarkan hambatan yang ada pada proses koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar melalui satgas pelajar kota. Bogor maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan mengadakan rapat koordinasi bulanan seluruh sekolah se-kota. Bogor dengan mengundang kepala sekolah, mahasiswa, pembina Osis dan guru BK guna meningkatkan kinerja implementor kebijakan terhadap tugas dan fungsinya.
2. Satgas pelajar kota. Bogor membuat kegiatan yang melibatkan *stakeholder* dengan masyarakat seperti sosialisasi kegiatan ataupun diskusi strategi pencegahan penyimpangan perilaku remaja bersama. Karena dukungan dari berbagai pihak dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Mengajukan proposal pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah terkait maupun sumber-sumber pendanaan lain baik dari dalam maupun luar instansi terkait. Mengadakan pembayaran kas rutin yang tidak memberatkan bagi anggota keuangan yang baik dapat mendukung proses koordinasi dalam organisasi.
4. Menghadirkan *rewards* yang sepadan kepada anggota yang memiliki tugas lebih dari anggota lain seperti pada satgas eksternal. *Rewards* dapat berupa sertifikat atau insentif sebagai penghargaan bagi anggota yang sudah berpartisipasi lebih dalam bertugas.